

**ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS ANGGARAN
BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) PADA
PUSKESMAS KENTEN PALEMBANG**

SKRIPSI



Nama : Amrillah

Nim : 222014362

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

2019

SKRIPSI

**ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS ANGGARAN
BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) PADA
PUSKESMAS KENTEN PALEMBANG**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



Nama : Amrillah

Nim : 222014362

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

2019

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Analisis Tranparansi dan Akuntabilitas Anggaran Bantuan
Operasional Kesehatan (BOK) pada Puskesmas Kenten
Palembang
Nama : Amrillah
NIM : 222014362
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik

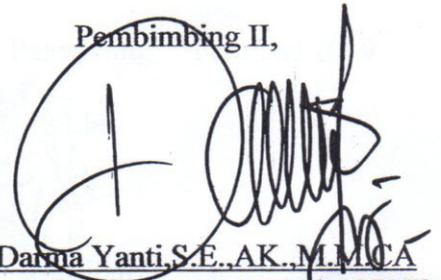
Diterima dan Disahkan
Pada tanggal, Januari 2019

Pembimbing I,



Drs.Sunardi,S.E.,M.Si
NIDN/NBM: 0206046378/859196

Pembimbing II,



Darna Yanti,S.E.,AK.,M.MCA
NIDN/NBM: 0219057901/1187172

Mengetahui,
Dekan

u.b. ketua program studi akuntansi



Betri Sirajudin,S.E.,M.Si.,AK.,CA
NIDN/NBM: 0216106902/944806

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Amrillah

NIM : 222014362

Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Palembang, Februari 2019



Amrillah

Amrillah

PERSEMBAHAN DAN MOTTO

Kupersembahkan kepada :

- *ALLAH SWT yang selalu memberiku kemudahan, kelancaran dan kekuatan dalam segala hal terutama dalam penyelesaian skripsi ini.*
- *Kedua Orang Tua ku (Bapak M. Riduan dan ibu Evi) tercinta yang telah banyak berkorban, mendidik dan menguras keringat serta mendorong saya menjadi mandiri dan yang selalu mengingatkan untuk selalu berpijak pada tempat yang diridhoinya.*
- *Istriku (Fitri Novita Sari, SKM) yang selalu memberikan kebahagiaan untuk bersama.*
- *Adikku (Elma Arlina) yang selalu memberikan semangat untuk mencapai kesuksesan.*

Motto :

- *“Jangan Berikan Ketakutan Mu Melebihi Rasa Takut Mu Pada Pencipta Mu (Allah SWT)”*
- *Apa yang paling bernilai bukanlah apa yang dimiliki di dalam kehidupan, melainkan siapa yang dimiliki dalam kehidupan ini.*
- *Setetes keringat orang tua ku, selangkah demi selangkah aku harus lebih maju.*
- *Yakinlah bahwa Allah tidak akan membebani seseorang melebihi kapasitas dan kemampuannya. Janganlah menyiksa diri dan orang lain dengan pikiran ataupun perasaan untuk sesuatu yang di luar kekuasaan kita. (QS Al-Mukmin : 62)*

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ASSALAMU'ALAIKUM WARAHMATULLAH WABAROKATUH

Alhamdulillahirobbil A'lamin, puji syukur kehadiran Allah SWT. Berkat rahmat dan hidayat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pada Puskesmas Kenten Palembang. Skripsi ini penulis ajukan dalam rangka memenuhi syarat untuk, mengikuti kegiatan ujian komprehensif pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan terutama kepada Allah SWT, yang telah memberikan jalan dan kemudahan serta kelancaran penulisan skripsi ini hingga dapat terselesaikan, kepada kedua orang tuaku, kepada Bapakku M.riduan dan Ibuku Evi atas doa dan kasih sayang serta memberikan dorongan baik materil maupun spirit yang tiada hentinya. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sunardi, S.E., M.Si dan Darmayanti, S.E., AK., M.M.CA sebagai dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, semangat, dan saran-saran dengan ikhlas dan penuh kesabaran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan tak lupa juga penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak DR. Abid Djazuli, S.E., MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Drs. H. Fauzi Ridwan selaku DEkan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Palembang.
3. Bapak Betri Sirajuddin S.E., Ak., M.Si., CA dan Bapak Mizan, S.E., M.Si., Ak. CA selaku ketua dan sekretaris program studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang

4. Bapak Sunardi S.E.,M.Si dan Ibu Darmayanti S.E.,AK.,M.M.CA selaku pembimbing saya.
5. Ibu Dewi Puspa Sari S.E.,M.Si selaku pembimbing akademik program studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh staff pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan penulis satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas budi kalian. Akhirukalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih, kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal ibadah kalian semua mendapat balasan dari-Nya dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya.

Wasalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Palembang, Februari 2019

Penulis



Amrillah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO	iv
HALAMAN PRAKATA	v
HALAMAN DAFTAR ISI	vii
HALAMAN DAFTAR TABEL	ix
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori	14
1. Transparansi.....	14
A. Pengertian Transparansi.....	14
B. Pengukuran Transparansi.....	17
2. Akuntabilitas.....	18
A. Pengertian Akuntabilitas.....	18
B. Pengukuran Akuntabilitas	21
3. BOK (Bantuan Operasional Kesehatan)	22

B. Penelitian Sebelumnya.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	28
B. Lokasi Penelitian.....	29
C. Operasional Variabel.....	29
D. Data Yang di Perlukan.....	29
1. Data primer	30
2. Data sekunder	30
E. Metode Pengumpulan Data.....	30
F. Analisis Data dan Teknik Analisis.....	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	
1. Gambaran Umum Puskesmas Kenten Palembang.....	34
2. Sarana dan Prasarana Puskesmas Kenten Palembang	38
3. Sumber Daya Ketenagaan Puskesmas Kenten Palembang.....	39
4. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Puskesmas Kenten	41
B. Pembahasan Hasil Penelitian	
1. Transparansi.....	42
2. Akuntabilitas.....	52
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	
A. Simpulan.....	63
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Pelaksanaan Kegiatan Dan Laporan Anggaran BOK.....	9
Tabel II.1 Persamaan dan perbedaan penelitian.....	27
Tabel III.1 Operasional Variabel.....	29
Tabel IV.1 Pimpinan Puskesmas Kenten Palembang.....	34
Tabel IV.2 Demografi Puskesmas Kenten Palembang.....	36
Tabel IV.3 Jumlah Penduduk Puskesmas Kenten Palembang.....	37
Tabel IV.4 Sarana Pendidikan dalam Wilayah Kerja Puskesmas Kenten.....	38
Tabel IV.5 Sarana dan Prasarana Kesehatan di Wilayah Puskesmas Kenten....	39
Tabel IV.6 Data Tenaga Puskesmas Kenten Palembang.....	39
Tabel IV.7 Pelaksanaan Kegiatan dan Laporan Anggaran BOK.....	43
Tabel IV.8 Rekapitulasi Kuesioner Indikator Transparansi Informatif.....	45
Tabel IV.9 Rekapitulasi Kuesioner Indikator Transparansi Keterbukaan.....	48
Tabel IV.10 Rekapitulasi Kuesioner Indikator Transparansi Pengungkapan....	50
Tabel IV.11 Rekapitulasi Kuesioner Indikator Hukum dan Kejujuran.....	53
Tabel IV.12 Rekapitulasi Kuesioner Indikator Akuntabilitas Proses.....	56
Tabel IV.13 Rekapitulasi Kuesioner Indikator Akuntabilitas Program	58
Tabel IV.14 Rekapitulasi Kuesioner Indikator Akuntabilitas Kebijakan.....	60

ABSTRAK

Amrillah / 222014362/2019 / Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pada Puskesmas Kenten Palembang / Akuntansi Sektor Publik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pada Puskesmas Kenten Palembang. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif yang dimaksud adalah mendeskripsikan dan memaparkan hasil penelitian mengenai proses penyaluran, penggunaan, pelaksanaan, pelaporan dan pengawasan tentang anggaran dan pelayanan pada Puskesmas Kenten Palembang. dan sampel penelitian ini sebanyak 40 orang. Alat pengambilan data adalah kuesioner, metode analisis yang di gunakan penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai-nilai variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antar variabel lain. Deskriptif hanya akan mendeskripsikan keadaan atau suatu gejala yang telah direkam melalui alat ukur kemudian diolah sesuai dengan fungsinya. Hasil pengolahan tersebut selanjutnya dipaparkan dalam bentuk angka-angka sehingga lebih mudah di tangkap maknanya yaitu dengan menyajikan data-data dalam bentuk angka maupun tabel.

Disimpulkan bahwa dari hasil pembahasan dan penyajian data bahwa pengelolaan anggaran dan realisasi Puskesmas, Transparansi dalam pemberian informasi tentang penerimaan dan anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada Puskesmas Kenten Palembang belum dilakukan secara terbuka kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak mendapatkan informasi yang akurat dalam pengelolaan anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). Dan Pada Puskesmas Kenten Palembang akuntabilitas (pertanggung jawaban) kepada Pemerintah Pusat sudah terlaksana dengan baik, tetapi kepada masyarakat belum terlaksana dengan baik.

Kata kunci: Transparansi, Akuntabilitas, Anggaran BOK

Abstract

Amrillah / 222014362/2019 / The Analysis of Transparency and Accountability of Health Operational Assistance Budget (BOK) at Puskesmas Kenten Palembang / Public Sector Accounting.

This study aimed to determine the implementation of Transparency and Accountability for Health Operational Assistance Budget (BOK) at Puskesmas Kenten Palembang. The data analysis method used in this study was qualitative analysis that described and explained about the results about the process of distribution, use, implementation, reporting and supervision of the budget and services at Puskesmas Kenten Palembang. The sample of this study was 40 people. The data collection tool was a questionnaire, the analytical method used in descriptive research was research conducted to determine the values of variables or more (independent) without making comparisons, or connecting between other variables. The descriptive would only describe the condition or a phenomenon that has been recorded through a measuring instrument and then processed according to its function. The results of the processing were then presented in the form of numbers so that the meaning was easier to comprehend, that was by presenting data in the form of numbers or tables.

It was concluded that from the results of the discussion and presentation of data that the management of the budget and realization of the Puskesmas, transparency in providing information about the receipt and budget of the Health Operational Assistance (BOK) at Puskesmas Kenten Palembang had not been openly conducted to the community so that the community did not obtain accurate information in managing the Aid budget Operational Health (BOK). And at the Puskesmas Kenten Palembang, accountability (accountability) to the Central Government has been implemented well, but the community has not done it well.

Keywords: Transparency, Accountability, BOK Budget

PENGESAHAN

NO. 304 /Abstract/LB/UMP/ 2 / 20 19

Telah di Koreksi oleh

Lembaga Bahasa

Universitas Muhammadiyah Palembang





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kualitas pelayanan adalah standar yang harus di upayakan apabila Pemerintah ingin memberikan kontribusi yang maksimal pada pengguna layanan jasa atau masyarakat. Saat ini upaya untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat menjadi perhatian utama bagi organisasi privat maupun publik. Masyarakat atau pengguna layanan jasa akan merasa dimudahkan atas permasalahan yang mereka alami dan rasakan. Kualitas pelayanan tersebut meliputi kegiatan aktivitas aparatur Negara untuk memenuhi permintaan pengguna jasa, secara spesifik kegiatan tersebut merupakan metode, prosedur maupun sistem yang ada sebagai kesatuan untuk menghasilkan pelayanan yang memuaskan.

Tuntutan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik berkembang seiring dengan berkembangnya kesadaran bahwa warga memiliki hak untuk dilayani dan juga mengontrol kegiatan pelayanan. Ketika pelayanan publik berkembang dengan baik maka akan tercipta kepuasan pelanggan yang baik pula. Pelayanan publik yang baik ditandai dengan meningkatnya stabilitas negara dan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Negara.

Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas

pertanggung jawaban Pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Hasil dari akuntansi adalah laporan keuangan. Pada dasarnya pembuatan laporan keuangan adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung akuntabilitas yang berupa keterbukaan Pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. (Mardiasmo, 2009).

Lingkup transparansi dan akuntabilitas harus menjangkau beberapa tingkat kebijakan mulai dari perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, sampai pada pelaksanaannya yang terjadi di segenap institusi. Menurut Sujarweni (2015) Transparansi memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung-jawaban Pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang di percayakan kepadanya dan ketaatannya pada Peraturan Perundang-undangan. Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan Pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Pelayanan publik yang berkualitas dilingkungan Lembaga Pemerintah juga dapat dilakukan dengan membudayakan konsep akuntabilitas publik. Akuntabilitas sendiri menurut Menurut Mardiasmo (2004) mengartikan akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan, dan

mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut.

Penyediaan pelayanan publik oleh pemerintah daerah salah satunya ada pada bidang kesehatan. Bidang kesehatan ini menjadi penting karena kesehatan merupakan salah satu ukuran untuk mengetahui kesejahteraan masyarakat di suatu daerah, untuk itu diperlukan upaya yang maksimal bagi pemerintah daerah untuk menyediakan pelayanan di bidang kesehatan yang berkualitas.

Pelayanan dibidang kesehatan ini diwujudkan salah satunya melalui pelayanan unit terkecil wilayah suatu daerah yang juga disebut sebagai Puskesmas. Peningkatan Pelayanan Kesehatan melalui Puskesmas ini merupakan suatu cara Pemerintah Daerah untuk meyakinkan masyarakat bahwa Pemerintah mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakatnya, dengan memberikan bantuan untuk masyarakat melalui Pemerintah dengan adanya anggaran dana BOK bagi Puskesmas. Anggaran dana BOK merupakan Bantuan Operasional Kesehatan. Dalam surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 494/Menkes/SK/IV/2010 tentang petunjuk teknis Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) bagi puskesmas dalam melakukan berbagai upaya kesehatan yang bersifat promotif dan preventif, merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah dalam upaya kesehatan. Puskesmas sebagai Unit Pelaksana Kesehatan Teknik (UPT) mempunyai fungsi yang amat strategis

karena berada di ujung tombak pelayanan yang bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan diwilayah kerjanya secara proaktif dan responsif.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan :

Pasal 1, Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan dijadikan sebagai acuan bagi Kepala Puskesmas, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi serta petugas kesehatan di Puskesmas dan Kabupaten/Kota dan Provinsi agar dalam pengelolaan teknis Bantuan Operasional Kesehatan pada tahun 2015 dilakukan secara akuntabel, transparan, efektif, dan efisien.

Pasal 2, Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bertujuan untuk:

- a. Memberikan pemahaman yang sama tentang konsep dasar, arah dan prinsip pengelolaan teknis Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Dinas Kesehatan Provinsi; dan
- b. Memastikan pengelolaan teknis Bantuan Operasional Kesehatan dilakukan secara benar, tepat waktu, tepat pelaksanaan, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat serta tepat pertanggungjawaban.

Pasal 3, Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pemerintah Daerah, dituntut lebih kreatif dan inovatif memadukan semua potensi yang ada untuk pembangunan kesehatan dan mengupayakan dengan sungguh-sungguh pemenuhan anggaran pembangunan kesehatan sebesar 10% dari APBD sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan khususnya kegiatan yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat melalui operasional Puskesmas.

Kementerian Kesehatan RI telah mengeluarkan kebijakan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk peningkatan akses pelayanan di puskesmas dan jajarannya berupa Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 494/Menkes/SK/ IV/2010 yang diperbaharui melalui Peraturan Menteri kesehatan RI No. 210/Menkes/Per/I/2011 tanggal 31 Januari 2011 tentang petunjuk teknis BOK. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 71 Tahun 2016 tentang petunjuk teknis penggunaan Anggaran Dana BOK, anggaran Dana BOK Tidak dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelian Obat-obatan.

Penyelenggaraan pembangunan kesehatan dimaksudkan untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, mandiri dan berkeadilan. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 28 H ayat 1 yang menyatakan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan investasi untuk keberhasilan pembangunan bangsa.

Tantangan pembangunan kesehatan semakin kompleks yang ditandai dengan perubahan kondisi kesehatan yang semakin tidak menentu baik di tingkat lokal maupun nasional. Untuk itu diperlukan komitmen Pemerintah

dalam mensinergikan upaya pembangunan kesehatan baik di pusat maupun di daerah. Walaupun bidang kesehatan merupakan salah satu kewenangan wajib pemerintah kabupaten/kota, namun pemerintah pusat tetap bertanggung jawab atas keberhasilan pembangunan kesehatan secara nasional. Begitu juga di dalam pasal 34 UUD 1945 disebutkan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Salah satu bentuk nyata dari implementasi pasal tersebut adalah dengan Pembangunan Puskesmas dan jaringannya yang memiliki fungsi strategis sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya secara proaktif dan responsif. Kinerja Puskesmas selalu dituntut untuk terus lebih baik sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi hak hidup sehat bagi penduduknya termasuk bagi masyarakat miskin dan masyarakat yang tinggal di tempat yang sulit dijangkau. Peraturan Menteri Kesehatan No 66 tahun 2017 telah menjelaskan bahwa Puskesmas haruslah bersifat transparan, akuntabel serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2015 tentang Teknis Bantuan Operasional Kesehatan pada prinsip dasarnya pemanfaatan Bantuan Operasional Kesehatan harus memperhatikan tata kelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparansi, akuntabilitas sehingga pengelolaan keuangan dana Bantuan Operasional Kesehatan menyangkut sumber dana dan jumlah dana, rincian penggunaan dan pertanggung jawaban dilaksanakan secara terbuka terhadap masyarakat sehingga memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk

mengetahuinya. Serta pengelolaan dan pemanfaatan dana Bantuan Operasional Kesehatan harus akuntabilitas yang dapat di pertanggung jawabkan sesuai dengan aturan Juknis Bantuan Operasional Kesehatan dan peraturan terkait lainnya. Dan pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara efisien dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara tepat, cermat dan seminimal mungkin untuk mencapai tujuan seoptimal mungkin dan tidak duplikasi dengan sumber pemberdayaan lain. Serta kegiatan yang dilaksanakan dengan efektif berdaya tingkat tinggi terhadap pencapaian program kesehatan prioritas nasional. Dan kegiatan pemanfaatan dana Bantuan Operasional Kesehatan dilaksanakan secara terpadu baik dari segi dana, waktu, kegiatan, serta sarana untuk pencapaian target program kesehatan dengan melibatkan para pelaksana program di Puskesmas, Kader Kesehatan, lintas sektor serta unsur lainnya. Pemanfaatan dana Bantuan Operasional Kesehatan menggunakan prinsip satuan kewilayahan, Administrasi (RT), RW, Dusun, Desa atau Kelurahan, Kecamatan, Sekolah dan Satuan Administrasi lainnya.

Pada penelitian terdahulu, Poppy (2018) yang berjudul Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dengan Pendekatan *value for money* Pada Puskesmas Binakarsa Pematang III/B Kecamatan Mesuji Makmur Kabupaten OKI memiliki beberapa dana yang di anggarkan tetapi tidak direalisasikan sepenuhnya. Puskesmas Binakarsa mencantumkan beberapa kegiatan dan belanja pada laporan keuangannya seperti anggaran belanja jasa kesehatan non kapitasi

sebesar Rp.24.000.000 namun yang terealisasi hanya Rp.10.300.000 atau 43% dari anggaran, puskesmas juga mencantumkan transport penyuluhan Rp.15.500.000 yang terealisasi hanya Rp.1.500.000, kemudian ada kegiatan dinas ke luar kota sebesar Rp.10.000.000 yang terealisasi hanya Rp.670.000 atau hanya 6% dari dana yang dianggarkan tidak hanya itu dalam laporan anggaran dan realisasi Puskesmas Binakarsa juga mencantumkan anggaran yang tidak terealisasi sama sekali seperti transport kunjungan kerumah warga, konsumsi peserta penyuluhan, kursus singkat pelatihan, belanja ATK penyuluhan, belanja pemeriksa HB dan kolestrol, belanja modal dan peralatan mesin, belanja lemari arsip, belanja tv dan kursi semua kegiatan dan belanja tersebut di anggarkan namun tidak direalisasikan.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat, Puskesmas Kenten Palembang merupakan salah satu pelayanan kesehatan strata pertama yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Puskesmas Kenten Palembang berdiri pada 1 Mei 1971 yang masih merupakan KIA, beralokasi di Jl. MP Mangkunegara No. Balai Pengobatan (BP) dan KIA. Seiring berkembangannya, berubah menjadi Puskesmas Induk yang melayani Kelurahan 8 Ilir dan Kelurahan dan Kelurahan Kuto Batu Palembang. Selanjutnya di bantu dengan Puskesmas Pembantu 8 Ilir dan Tuna Netra. Berdasarkan SK Walikota Palembang Kenten mendapatkan Wilayah kerja baru yaitu Kelurahan Duku.

Dana BOK merupakan anggaran yang digunakan untuk membantu Puskesmas dalam menjalankan kegiatan Pelayanan Kesehatan, seperti Kegiatan Poskesdes, dan Posyandu yang secara rutin dilakukan oleh

Puskesmas Kenten Palembang, anggaran ini diharapkan dapat mencukupi kebutuhan keuangan Puskesmas dalam melakukan Pelayanan Kesehatan. Puskesmas Kenten Palembang pada tahun 2017 mendapatkan Anggaran Bantuan Operasional Kesehatan dari Pemerintah Sebesar Rp. 385.000.000. Berikut adalah beberapa pelaksanaan kegiatan dan hasil laporan anggaran BOK Puskesmas Kenten Palembang :

Tabel. I. 1
Pelaksanaan Kegiatan Dan Laporan Anggaran BOK
Puskesmas Kenten Palembang Tahun 2017

No	Kegiatan	Rincian Pelaksanaan	Sumber Biaya BOK
A. UKM Essensial & Pengembangan :			
1	Upaya Kesehatan Ibu (Pelayanan Antenatal Care (ANC), Pelayanan Ibu Nifas)	- Transport - Konsumsi - Pembelian reagen - ATK Kegiatan - Spanduk	Rp. 18.937.500
2	Upaya Kesehatan Neonatus dan Bayi/balita	- Transport - Konsumsi - Narasumber - Honor narasumber - ATK Kegiatan - Spanduk	Rp. 11. 285.000
3	Upaya Kesehatan Anak Balita dan Pra Sekolah	- Transport - PMT Penyuluhan	Rp. 25.180.000
4	Upaya Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja (pelayanan kesehatan anak usia sekolah institusi dan non institusi, Bias campak, Bias DT.Td)	- Transport - Konsumsi - ATK Kegiatan - ATK Peserta - Fotokopy - Spanduk	Rp. 26.735.000
5	Imunisasi (imunisasi dasar, imunisasi dasar lengkap termasuk introduksi vaksin baru)	- Transport - Konsumsi - Fotocopy - ATK Kegiatan - ATK Peserta - Spanduk	Rp. 46.270.000
6	Upaya kesehatan lanjut usia (Pelayanan kesehatan lanjut usia)	- Transport - Pembelian reagen - ATK Kegiatan - Spanduk	Rp. 47.641.000

7	Upaya Kesehatan Lingkungan (pelayanan kesehatan lingkungan)	- Transport - Konsumsi - ATK Kegiatan - Honor narasumber - ATK Peserta - Spanduk - Pamflet - Poster	Rp. 15.860.000
8	Upaya Promosi Kesehatan (pelayanan promkes)	- Transport - Konsumsi - Fotocopy materi - ATK Peserta - ATK Kegiatan - Spanduk - Fotocopy checklist - Honor narasumber	Rp. 88.225.000
9	Upaya Pencegahan & Pengendalian Penyakit Menular Langsung (TB, HIV/AIDS, DIARE, ISPA)	- Transport - Konsumsi - Fotocopy - ATK Peserta - ATK Kegiatan - Honor narasumber - Media KIE - Spanduk	Rp. 19.800.000
10	Upaya Pencegahan & Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zootonik (Malaria & DBD)	Transport Kader	Rp. 960.000
11	Upaya Pencegahan & Pengendalian Penyakit Tidak Menular (deteksi dini dan tindak lanjut dini)	- Transport - ATK Kegiatan - Spanduk	Rp. 1.090.000
12	Upaya Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa & NAFZA	- Transport - Konsumsi - Fotocopy - ATK Peserta - Spanduk	Rp. 12.635.000
13	Upaya Kesehatan Kerja (pembinaan dan pemantauan Pos UKK)	Transport	Rp. 240.000
14	Upaya Kesehatan Tradisional (pembinaan dan pemantauan kesehatan tradisional)	Transport	Rp. 960.000
15	Upaya Kesehatan Olahraga (pemeriksaan kebugaran pegawai puskesmas)	Transport	Rp. 1.720.000
16	Upaya Kesehatan Gigi dan Mulut	- Transport - Dental kit - spanduk - ATK Kegiatan	Rp. 6.330.000
B. Dukungan Manajemen di Puskesmas			
1	Manajemen Puskesmas (jasa petugas	- Jasa	Rp. 55.290.000

	promkes, minilokakarya puskesmas, minilokakarya Lintas Sektoral dan rapat-rapat lintas program)	- Konsumsi - Spanduk - ATK Kegiatan - Transport - Honor narasumber - ATK Peserta	
2	Penyediaan Bahan Habis Pakai (ATK BOK)	ATK BOK	Rp. 3.600.000
3	Konsultasi & Pembinaan Teknis (konsultasi ke Dinkes)	Transport	Rp. 1.160.000
4	Sistem Informasi (pengadaan laporan dan pengiriman laporan)	- Fotocopy - Transport	Rp. 1.081.500
GRAND TOTAL UKM ESSENSIAL & DUKUNGAN MANAJEMEN PUSKESMAS			Rp. 385.000.000

Sumber : Data Anggaran BOK Puskesmas Kenten tahun 2017

Dari tabel. I.1 bisa kita ketahui bahwa Pelaksanaan Kegiatan Dan Laporan Anggaran BOK Puskesmas Kenten Palembang sudah terealisasi 100% artinya pelaksanaannya sudah dilakukan dengan baik oleh Puskesmas Kenten Palembang dengan nominal sebesar Rp.385.000.000.

Puskesmas Kenten Palembang secara keseluruhan memiliki beberapa fenomena yang teridentifikasi, yaitu tidak adanya informasi tentang pengelolaan anggaran dana BOK baik melalui media elektronik maupun media informasi lainnya, dan belum adanya akses untuk memperoleh informasi tentang anggaran dana BOK dalam bentuk Pelayanan dan Pelaksanaan, serta Puskesmas belum melakukan pengumuman pencatatan laporan perencanaan, pengelolaan, pertanggung jawaban anggaran dana BOK kepada masyarakat. Dan Puskesmas Kenten Palembang tidak pernah mengadakan musyawarah yang diikuti masyarakat dalam peningkatan kebijakan Pelayanan Kesehatan, dan Puskesmas Kenten Palembang tidak menyadari bahwa informasi keuangan yang terbuka, menyeluruh dan jujur kepada masyarakat itu adalah bukti pertanggung jawaban Puskesmas kepada

Pemerintah. Kemudian akuntabilitas Puskesmas Kenten Palembang dalam pelaksanaan anggarannya belum diawasi secara terus menerus oleh pengawas intern maupun ekstern, Puskesmas Kenten Palembang dalam pelaksanaan anggaran penetapan program-program belum dirancang dengan mempertimbangkan efektivitas penggunaan Sumber Daya, serta bantuan anggaran dana BOK belum mencukupi untuk memenuhi biaya pengeluaran Puskesmas Kenten Palembang, dan Puskesmas Kenten Palembang belum mampu menjelaskan, menjawab dan mempertanggung jawabkan setiap kebijakan publik secara profesional kepada publik melalui visi misi yang dibuat.

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah tersebut maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “ **Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pada Puskesmas Kenten Palembang**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang tersebut maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah bagaimanakah pelaksanaan Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pada Puskesmas Kenten Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang tersebut maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pada Puskesmas Kenten Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang tersebut maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak di antaranya:

1. Bagi peneliti

Sebagai tambahan pengetahuan dan pengalaman dalam proses penelitian tentang Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pada Puskesmas Kenten Palembang.

2. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan referensi serta dapat menambah wawasan dan menjadi informasi.

3. Bagi Puskesmas Kenten Palembang

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai wadah dalam menyalurkan aspirasi mengenai Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pada Puskesmas Kenten Palembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Icih, Arso Nur Astuti. 2014. *Pengaruh Akuntansi Keuangan Sektor Publik Terhadap Perwujudan Tranparasi Akuntabilitas Dan Konsep Value For Money*. Dimensia Vol 25-66
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 494.Menkes/SK/IV/2010. *Petunjuk teknis bantuan operasional kesehatan*. Jakarta:Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Nomor 210/Menkes/Per/I/2011. *Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan*, Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta, 2011.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Andi Yogyakarta
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Andi Yogyakarta
- Mardiasmo. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Andi Yogyakarta
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Andi Yogyakarta
- Mahmudi. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Uppt Stim Ykpn
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 Tentang *Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan*. Jakarta, 2015
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2016. *Petunjuk teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017*. Jakarta: Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2017, *Puskesmas bersifat transparan, akuntabel*. Jakarta: Menteri Kesehatan Indonesia..
- Poppy, Kania. 2018 Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dengan Pendekatan *value for money*
- Puskesmas Kenten Palembang. 2017. *Profil Puskesmas Kenten Palembang tahun 2017*. Palembang
- Renyowijoyo. 2013. *Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba*. Jakarta: Mitra Wacana Media

Rukayah, Nugrahini Kusumawati. 2017. *Analisis laporan realisasi anggaran dengan menggunakan rasio efektivitas dan rasio efisiensi pada kantor badan perijinan terpadu dan penanaman modal kabupaten serang*. Jurusan Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bina Bangsa Banten.

Sujarweni V.Wiratna. 2015. *Akuntansi Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press

Sugiyono. 2016. *Metodelogi penelitian bisnis*. Bandung: Alfabeta

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang *Kesehatan*